



**BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi ketersediaan data nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaia terhadap nama jabatan dan kelas jabatan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....2

4. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal I Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lampiran Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 26) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....3

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 23 Januari 2024

**BUPATI BUNGO,**

  
**MASHURI**

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 23 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 6**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BUNGO

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	15
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	13
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13
4	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia	13
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra	14
6	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12
7	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	8
8	Analisis Pemerintahan Daerah	7
9	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
10	Pengadministrasi Pemerintahan	5
11	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	8
12	Analisis Pengembangan Wilayah	7
13	Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi Dan Paten	6
14	Pengadministrasi Batas Wilayah	5
15	JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Muda (Hasil Penyetaraan)	9
16	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7
17	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6
18	Pengadministrasi Otonomi Daerah	5
19	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12
20	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	9
21	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	7
22	Pengelola Urusan Agama	6
23	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	6
24	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	8
25	Penyuluh Transmigrasi	7
26	Pengelola Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6
27	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6
28	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	8
29	Analisis Kemasyarakatan	7
30	Pengelola Data	6
31	Pengadministrasi Persuratan	5
32	Kepala Bagian Hukum	12
33	JF Analis Hukum Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	9
34	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pratama	8
35	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7
36	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6
37	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5
38	JF Analis Hukum Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	9
39	Analisis Hukum	7
40	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	6
41	Pengadministrasi Hukum	5
42	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	8
43	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
90	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	7
91	Operator Alat Berat	5
92	Pengadministrasi Umum	5
<b>XXIX. KECAMATAN</b>		
1	Camat	12
2	Sekretaris Kecamatan	11
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
4	Pengadministrasi Umum	5
5	Pengelola Kepegawaian	6
6	Pengemudi	3
7	Pramu Kebersihan	1
8	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset	8
9	Bendahara	7
10	Pengadministrasi Keuangan	5
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
12	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6
13	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8
14	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
15	Pengadministrasi Kependudukan	5
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8
17	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6
18	Kepala Seksi Perekonomian	8
19	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6
20	Kepala Seksi Sosial Budaya	8
21	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6
22	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8
23	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6
<b>XXX. KELURAHAN</b>		
1	Lurah	9
2	Sekretaris Kelurahan	8
3	Pengadministrasi Umum	5
4	Pengelola Keuangan	6
5	Pramu Kebersihan	1
6	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8
7	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
8	Pengadministrasi Kependudukan	5
9	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8
10	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6
11	Kopala Seksi Sosial Budaya	8
12	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6

BUPATI BUNGO,


  
MASHURI